

STUDI KOMPARASI KETAHANAN PANGAN DI KOTA SURABAYA DAN BENGKULU

Erasmus Humanika¹, Gita Mulyasari², Netta Agusti², Nola Windirah², Dona Wahyuning Layli¹

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur

²Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

e-mail : gita.mulyasari@unib.ac.id

ABSTRAK

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang permintaannya meningkat terus seiring bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kualitas. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan merupakan faktor kunci bagi pengurangan penduduk miskin sehingga penguatan ketahanan pangan akan berdampak secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kemiskinan dan ketahanan pangan di Kota Surabaya dan Bengkulu. Kemiskinan dilihat dari garis kemiskinan dan trend persentase jumlah penduduk miskin pada kedua kota tersebut. Sedangkan ketahanan pangan dikaji dari gambaran mengenai pengeluaran rumah tangga, indeks keterjangkauan, indeks pemanfaatan dan indeks ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Surabaya memiliki indeks ketahanan pangan lebih tinggi dibandingkan dengan kota Bengkulu. Kota Surabaya masuk dalam kategori “sangat tahan”, sedangkan kota Bengkulu dengan kategori ketahanan pangan “agak tahan”. Kondisi kemiskinan di kota Bengkulu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota Surabaya menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas utama di Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang tangguh.

Kata kunci : Kemiskinan, Pengeluaran Rumah Tangga, Ketahanan Pangan.

ABSTRACT

Food is a basic human need whose demand continues to increase as the population increases and quality improves. In the context of poverty alleviation, food security is a key factor for reducing the poor population so that strengthening food security will have a significant impact on reducing poverty. This research aims to examine the conditions of poverty and food security in the cities of Surabaya and Bengkulu. Poverty is seen from the poverty line and the trend in the percentage of poor people in the two cities. Meanwhile, food security is assessed from a picture of household expenditure, affordability index, utilization index and food security index. The research results show that the city of Surabaya has a higher food security index compared to the city of Bengkulu. The city of Surabaya is in the "very resistant" category, while the city of Bengkulu is in the "somewhat resistant" food security category. The condition of poverty in the city of Bengkulu is much higher compared to the city of Surabaya Poverty alleviation is a top priority program in Bengkulu Province to create strong food security conditions.

Keywords : Poverty, Household Expense, Food Security

I. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan juga merupakan isu utama dalam menuju Indonesia sebagai lumbung padi dunia (Achmad Lilik, 2022). Berdasarkan data *Global Food Security Index* (GFSI) pada tahun 2018, kondisi ketahanan pangan meningkat pada hampir di seluruh negara. Begitu pula

juga dengan Indonesia yang juga mengalami kenaikan peringkat dalam indeks ketahanan pangan. Pemerintah telah mencanangkan empat target utama pembangunan pertanian, yaitu (1) mewujudkan pencapaian swasembada dan keberlanjutan swasembada, (2) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, (3) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta (4) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani (Ditjen Tanaman Pangan, 2012).

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor keberlanjutan hidup yang sudah menjadi hak asasi manusia. Dalam UU No.18 tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai ketersediaan pangan bagi negara hingga ke perseorangan yang dicerminkan melalui jumlah yang cukup serta mutu yang baik, aman, bergizi, tidak menyalahi aturan agama serta adat dan budaya. Menurut Surraya (2010), ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang dapat meraih kebutuhan pangan untuk hidup yang lebih produktif serta sehat bagi tubuh. Sehingga kebutuhan akan pangan sangat berpengaruh pada setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pangan berperan penting dalam mensejahterakan kehidupan manusia sehingga ketahanan pangan sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan ekonomi nasional

Ketahanan pangan sendiri memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Ketahanan pangan dan kemiskinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, kondisi ketahanan pangan yang rentan menjadi sumber kemiskinan, sebaliknya karena miskin mengakibatkan tidak memiliki ketahanan pangan (Ajeng dkk, 2013). Keterkaitan antara kemiskinan dan ketahanan pangan tergambar melalui hubungan yang sangat erat antara kemiskinan, kelemahan fisik, kerentanan, isolasi, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan menyebabkan kelemahan fisik karena tidak cukup makan. Tidak cukup makan menyebabkan kurang gizi dan energi, yang akhirnya menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah (Zakiah, 2016).

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang menjadi agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan di kota Surabaya. Kondisi serupa juga ditemukan di Bengkulu. Bengkulu merupakan provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera (Tabel 1). Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan di Bengkulu masih tinggi yang berada jauh di atas angka kemiskinan nasional dan provinsi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tingginya kemiskinan di Bengkulu belum dapat terurai secara signifikan.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, kota Bengkulu memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan kota Surabaya. Kemiskinan erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk mengonsumsi pangan. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komparasi ketahanan pangan di Kota Surabaya dan Bengkulu.

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Surabaya dan Bengkulu, 2014 – 2021

Tahun	Surabaya		Bengkulu	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2014	0,78	0,16	3,54	0,91
2015	0,78	0,15	4,30	1,42
2016	0,92	0,25	4,11	1,22
2017	1,10	0,33	4,69	1,55
2018	0,81	0,20	4,53	1,38
2019	0,62	0,15	3,89	1,22
2020	0,87	0,24	3,51	1,02
2021	0,75	0,17	3,31	0,87

Sumber: BPS, 2022

II. KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kemiskinan dan ketahanan pangan saling terkait. Menurut (Cook dan Frank, 2008) serta (Zezza dan Tasciotti, 2010) kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang atau keluarga yang serba kekurangan termasuk untuk memenuhi pangannya. Kemiskinan merupakan hasil interaksi berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Chambers (2014) menjelaskan bahwa dalam rumah tangga miskin terdapat unsur-unsur yang terkait dan berhubungan erat dalam suatu mata rantai. Mata rantai tersebut dinamakan lingkaran setan yang membuat rumah tangga miskin yang akhirnya akan selalu terperangkap dalam kemiskinan. Ada hubungan yang sangat erat antara kemiskinan, kelemahan fisik, kerentanan, isolasi, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan menyebabkan kelemahan fisik karena tidak cukup makan. Tidak cukup makan menyebabkan kurang gizi dan energi, yang akhirnya menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah. Dengan demikian, ada keterkaitan antara kemiskinan dan ketahanan pangan. Miskin membuat seseorang menjadi terisolasi atau terisih baik secara fisik maupun sosial. Kemiskinan juga menjadikan seseorang menjadi rentan terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan. Selain itu, kemiskinan juga menjadikan seseorang menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraannya dan kedudukan yang rendah (Zakiah, 2016).

Sementara ketahanan pangan mencakup berbagai aspek, antara lain: kebiasaan makan/preferensi konsumen, ketersediaan, kehandalan, keberlanjutan, dan keterjangkauan. Dalam aspek ketersediaan mencakup tingkat nasional, wilayah dan rumah tangga. Kehandalan atau stabilitas memiliki dimensi waktu jangka pendek dan jangka panjang. Kecukupan dan keberlanjutan jangka panjang terkait dengan aspek pembangunan berkelanjutan. Keterjangkauan adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan keluarga sesuai dengan gizi yang sehat. Dengan demikian ketahanan pangan merupakan hal yang dinamis dan kompleks, bukan hanya masalah beras, akan tetapi mencakup aspek kemampuan keluarga untuk mencapai kecukupan pangan bergizi (Kasryno, 2004).

Konsep ketahanan pangan yang disepakati secara internasional dalam *World Conference on Human Right* 1993 dan *World Food Summit* 1996 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu baik dalam jumlah maupun mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat (Rosyadi & Purnomo, 2012). UU No. 18 Tahun 2012 menyebutkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Hasan & Saputra (2008) menyatakan bahwa secara tidak langsung kemiskinan menjadi indikasi akan lemahnya tahap penggunaan pangan akibat dampak tidak meratanya distribusi pendapatan dan seterusnya menjadikan mereka sebagai komunitas yang rawan pangan. Menurut Sumarwan dan Sukandar dalam Ermawati (2011), kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu pangan. Mereka yang dikategorikan miskin adalah keluarga yang rawan pangan atau tidak tahan pangan karena tidak mengkonsumsi pangan yang cukup. Selain karena daya beli yang rendah, pengetahuan tentang gizi rumah tangga miskin rendah, sehingga dalam mengkonsumsi makanan mereka kurang mempertimbangkan kandungan gizi pada makanan.



Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan
 Sumber : Kristiawan, 2021

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, terdapat beberapa faktor hal penting yang berpengaruh terhadap ketersediaan ketahanan pangan (Gambar 1). Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada empat poin yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sebab, apabila dan keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka dampaknya dapat meluas ke segi lainnva yang merugikan masyarakat termasuk ketahanan pangan. Selain itu baik tidaknya suatu infrastruktur akan sangat mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan. Infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya, dan menjadi tanggung jawab rakyat untuk menjaga dan memeliharanya agar terjadi simbiosis mutualisme demi tercapainya kemajuan di suatu bangsa, yang bagian kecilnya adalah tercapainva ketahanan pangan.

III.METODE PENELITIAN

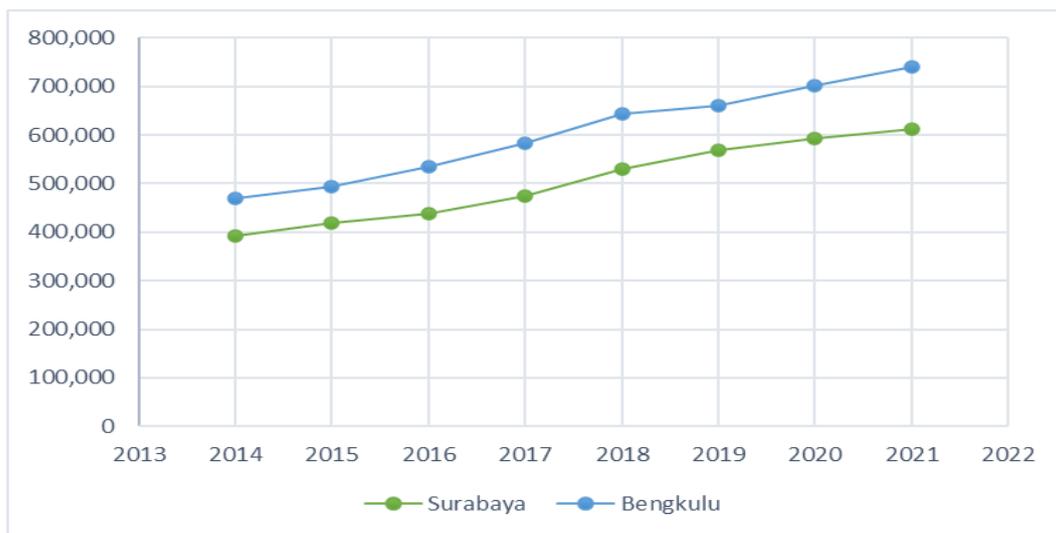
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, meliputi data kemiskinan, pengeluaran per kapita, data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan untuk Kota Surabaya dan Bengkulu. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif

indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui expert judgement (Tabel 2). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten/Kota dan Provinsi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kemiskinan Kota Surabaya dan Bengkulu

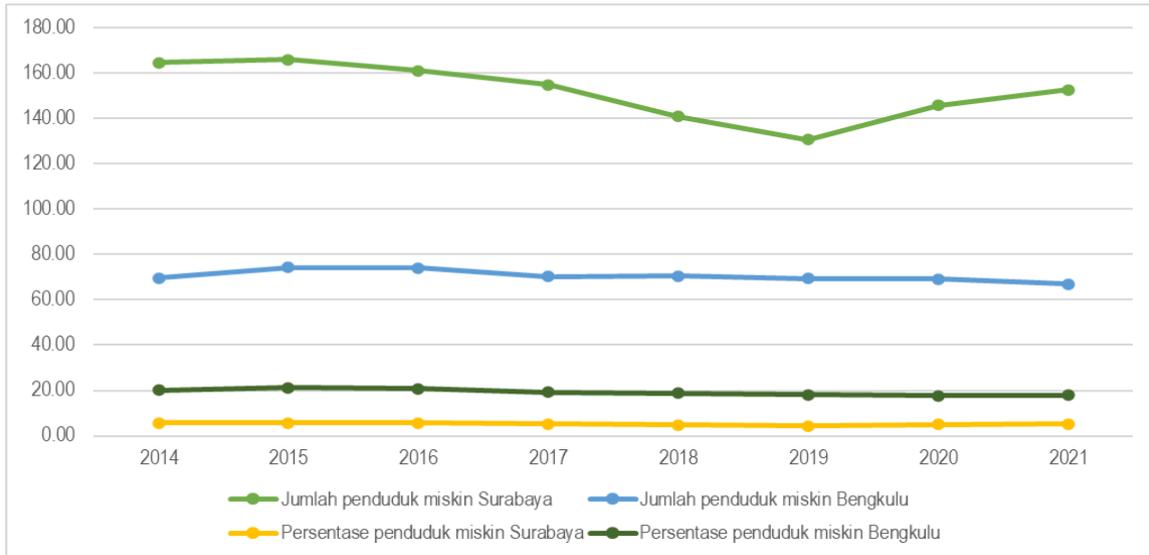
Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004).



Gambar 2. Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) kota Surabaya dan Bengkulu
Sumber: BPS, 2022

Garis Kemiskinan di Kota Bengkulu dari tahun 2014 - 2021 cenderung mengalami peningkatan (Gambar 2). Pada tahun 2014, tingkat garis kemiskinan di Kota Bengkulu yakni sebesar Rp468.880 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat sebesar Rp271.732 dimana pada tahun 2021 tingkat garis kemiskinan di Kota Bengkulu mencapai angka Rp740.612 perkapita perbulan. Sementara itu, peningkatan angka garis kemiskinan juga terjadi di Kota Surabaya dari tahun 2014 – 2021 (Gambar 2). Pada tahun 2014, tingkat garis kemiskinan di Kota Surabaya yakni sebesar Rp393.151 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat sebesar Rp218.315 per kapita perbulan dimana pada tahun 2021 tingkat garis kemiskinan di Kota Surabaya mencapai angka Rp611.466 per kapita per bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS dalam rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu dan Kota Surabaya cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Bengkulu terjadi di tahun 2015 dengan jumlah sebesar 74,26 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Kota Bengkulu terjadi pada tahun 2021 dengan angka sebesar 66,94 ribu jiwa. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh didapati bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Surabaya terjadi pada tahun 2015 dengan angka sebesar 165,72 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Kota Surabaya terjadi di tahun 2019 dengan angka sebesar 130,55 ribu jiwa.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin (ribu) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Surabaya dan Bengkulu
Sumber: BPS, 2022

Selain menggunakan data jumlah penduduk miskin, untuk mengetahui tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat diketahui dengan mengetahui persentase penduduk miskin. Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS, didapati bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu dan Kota Surabaya mengalami fluktuasi. Dimana data persentase penduduk miskin tertinggi di Kota Bengkulu terjadi di tahun 2015 dengan angka sebesar 21,14%, sedangkan persentase penduduk miskin terendah di Kota Bengkulu terjadi di tahun 2020 dengan angka sebesar 17,65%. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa persentase penduduk miskin tertinggi di Kota Surabaya terjadi di tahun 2015 dengan angka sebesar 5,82%, sedangkan persentase penduduk miskin terendah di Kota Surabaya terjadi di tahun 2019 dengan angka sebesar 4,51%.

Pengeluaran rumah tangga di Kota Surabaya dan Bengkulu

Pola pengeluaran masing-masing rumah tangga akan selalu berbeda dan tidak sama persis, karena setiap rumah tangga memiliki kebutuhan prioritas yang berbeda. Contohnya, sebuah rumah tangga dengan pendapatan yang terbatas akan mengutamakan kebutuhan pangan karena membeli barang-barang selain makanan akan membuat rumah tangga tersebut merasa kekurangan. Sebaliknya, rumah tangga dengan pendapatan tinggi cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang non-makanan. Misalnya, anggaran rumah tangga tersebut mungkin lebih banyak digunakan untuk investasi dalam pendidikan anak, seperti kursus atau fasilitas lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak.

Menurut (Deaton dan Muellbauer, 1980) jika tingkat kesejahteraan suatu negara meningkat, maka proporsi pengeluaran konsumsi makanan penduduknya akan menurun, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pola konsumsi rumah tangga dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika rumah tangga lebih banyak mengonsumsi kebutuhan non-makanan daripada makanan. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat akan menurun jika rumah tangga lebih banyak mengonsumsi kebutuhan makanan daripada non-makanan. Kesejahteraan rumah tangga yang rendah dapat dikaitkan dengan masyarakat berpendapatan rendah, dan termasuk dalam kategori rumah tangga yang miskin.

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (Rupiah) di tahun 2022, antara masyarakat Kota Bengkulu dan Kota Surabaya memiliki perbedaan (Tabel 2). Dimana rata-rata pengeluaran penduduk per kapita untuk jumlah makanan di Kota Bengkulu berada di angka 2,70, sedangkan Kota Surabaya berada di angka 1,70. Hal tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap jumlah makanan di Kota Bengkulu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di Kota Surabaya. Sementara itu, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita per bulan untuk jumlah bukan makanan di Kota Bengkulu berada di angka 5,08, sedangkan Kota Surabaya berada di angka 3,91. Hal tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap jumlah non makanan di Kota Bengkulu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di Kota Surabaya.

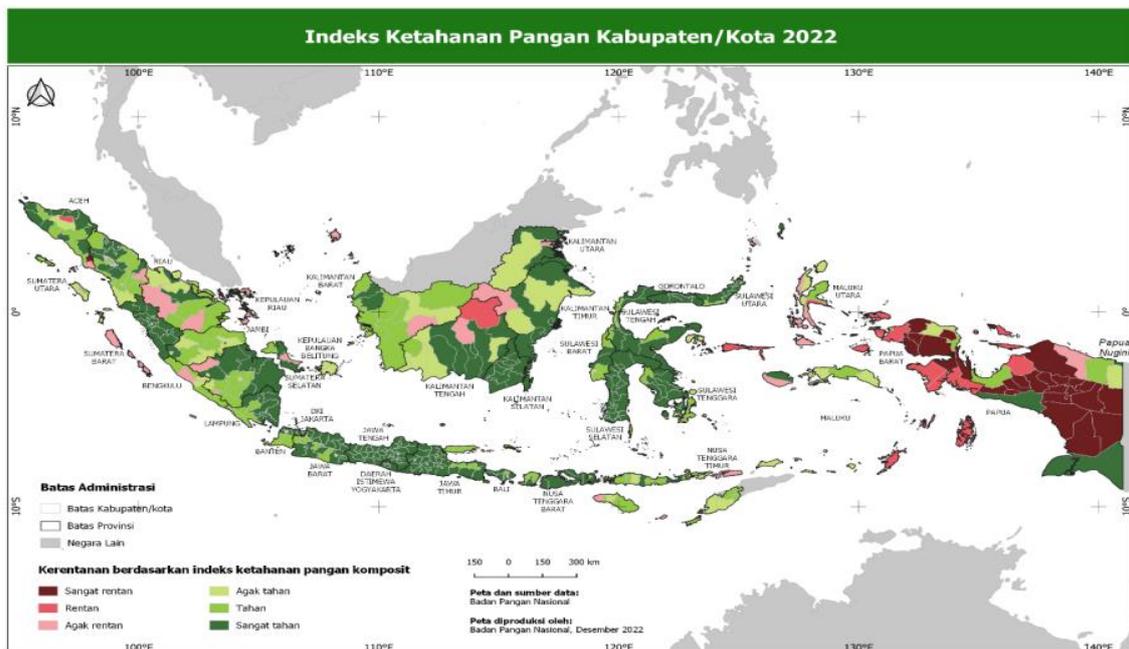
Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah)

Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran	
	Surabaya	Bengkulu
Padi-padian	1,45	2,12
Umbi-umbian	3,79	5,30
Ikan/udang/cumi/kerang	2,75	4,61
Daging	3,37	6,24
Telur dan susu	5,06	6,73
Sayur-sayuran	2,13	2,70
Kacang-kacangan	2,56	4,20
Buah-buahan	3,30	5,66
Minyak dan kelapa	2,23	3,36
Bahan minuman	2,28	3,40
Bumbu-bumbuan	2,65	3,76
Konsumsi lainnya	3,11	4,53
Makanan dan minuman jadi	2,32	3,93
Rokok dan tembakau	5,39	5,48
Jumlah Makanan	1,70	2,70
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	4,02	4,43
Aneka barang dan jasa	5,56	6,04
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	3,97	5,00
Barang tahan lama	16,62	17,83
Pajak, pungutan dan asuransi	4,70	5,15
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	20,51	51,99
Jumlah Bukan Makanan	3,91	5,08
Rata-rata Pengeluaran	2,81	3,71

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Surabaya dan Bengkulu, 2022

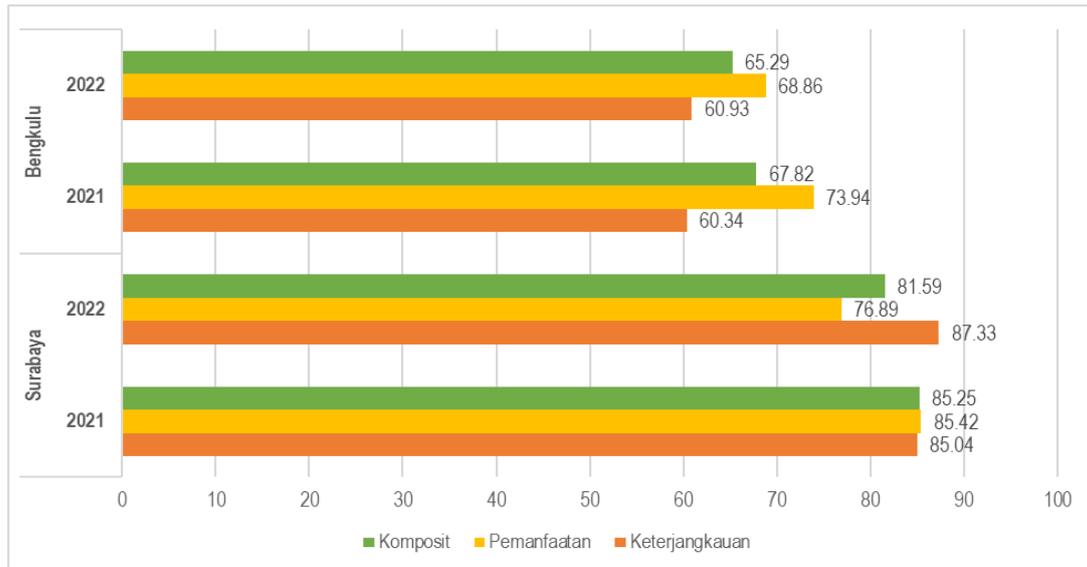
Komparasi Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Bengkulu

Ketahanan pangan adalah keadaan di mana kebutuhan pangan dari tingkat nasional hingga individu terpenuhi, yang dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, aman, beragam, bergizi, merata, serta dapat diakses dengan harga yang terjangkau. Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan adalah diterbitkannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Indonesia. FSVA Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme pada tahun 2022 melakukan pengelompokan status ketahanan pangan menjadi enam kategori prioritas. Dimana wilayah prioritas 1 termasuk ke dalam daerah dengan status rentan pangan tinggi, dan prioritas enam adalah wilayah yang berstatus tahan pangan tinggi.



Gambar 4. Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota tahun 2022
 Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2022

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*), baik Kota Bengkulu dan Kota Surabaya memiliki tingkat ketahanan pangan yang berbeda. Kota Bengkulu yang berada di Pulau Sumatera masuk dalam wilayah dengan indikasi warna merah muda, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kota Bengkulu termasuk daerah dengan tingkat ketahanan pangan “Agak rentan”. Sementara itu, Kota Surabaya yang berada di Pulau Jawa masuk dalam wilayah dengan indikasi warna hijau tua, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya termasuk daerah dengan tingkat ketahanan pangan “Sangat tahan”.



Gambar 4. Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Bengkulu, 2022

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2022

Tiga variabel yang selama ini berpengaruh besar dalam mencapai ketahanan pangan adalah keterjangkauan, pemanfaatan dan komposit pangan. Masing-masing variabel tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda di Kota Surabaya dan Kota Bengkulu. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa Kota Surabaya memiliki keterjangkauan pangan yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bengkulu. Dimana nilai keterjangkauan Kota Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 85,04 dan pada tahun 2022 sebesar 87,33, sedangkan nilai keterjangkauan Kota Bengkulu pada tahun 2021 sebesar 60,34 dan pada tahun 2022 sebesar 60,93.

Nilai pemanfaatan pangan Kota Surabaya memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bengkulu. Dimana nilai pemanfaatan pangan Kota Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 85,42 dan pada tahun 2022 berada di angka 76,89. Sedangkan nilai pemanfaatan pangan Kota Bengkulu pada tahun 2021 berada di angka 73,94 dan pada tahun 2022 berada di angka 68,86. Nilai komposit pangan di Kota Surabaya memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bengkulu. Dimana nilai komposit pangan Kota Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 85,25 dan pada tahun 2022 berada di angka 81,59. Sedangkan nilai komposit pangan Kota Bengkulu pada tahun 2021 berada di angka 67,82 dan pada tahun 2022 berada di angka 65,29

V. PENUTUP

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Terdapat perbedaan kondisi ketahanan pangan antara Kota Surabaya dengan Kota Bengkulu. Kota Surabaya yang berada di Pulau Jawa, termasuk daerah dengan tingkat ketahanan pangan “Sangat tahan”. Sementara itu, Kota Bengkulu yang berada di Pulau Sumatera, termasuk daerah dengan tingkat ketahanan pangan “Agak rentan”. Provinsi Bengkulu merupakan wilayah termiskin ketujuh di Indonesia dan pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas utama Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. 2022. Buku Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022. Badan Pangan Nasional 2022
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Kota Bengkulu dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Kota Surabaya dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2022. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya
- Chambers R. 2014. *Rural development: putting the last first. New York (US): Routledge.*
- Cook JT, Frank DA. 2008. *Food security, poverty, and human development in the United States. Ann N Y Acad Sci.* 1136(1):193-209.
- Deaton A., and J. Muellbauer. 1980. *Economics and Consumer Behavior. London: Cambridge University Press.*
- Ditjen Tanaman Pangan. 2012. Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk mencapai Sawsembada dan Sawsembada Berkelanjutan. Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Ermawati, R. O. (2011). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin pada Daerah Rawan Banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Pertanian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Goodridge P. 2007. *Method explained index number, economic and labour. Market Review.* 1(3): 54-57
- Hasan, Y., Saputra. W. (2008). Ketahanan pangan dan kemiskinan: Implementasi dan kebijakan penyesuaian. *Jurnal Ipteks Terapan*, 2(1), 146-168.
- Kasryno, Faisal, 2004. “Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi dan Otonomi: Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan” dalam dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (17 – 19 Mei 2004): Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi, Jakarta.
- Kristiawan. 2021. Ketahanan Pangan. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- M.A.L.C. Buchori, dkk. 2022. Kumpulan Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nas Media Pustaka, Yogyakarta.
- Mandala, Ajeng Ayu Nabila dkk. 2013. Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Sub Das Keduang Kabupaten Wonogiri. *Agro-Ekonomi* Vol. 24, No. 2, Hal. 125-137.
- Rosyadi, I., & Purnomo, D. (2012). Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Tertinggal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 303–315.
- Surraya T. 2010. *Food Supply Chain Management: Challenges and Strategies. Journal of Food Security* 1(1):12-23
- Suryawati, Chriswardani, 2004, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”, *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012. Pangan. 17 November 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 227. Jakarta; 2012.
- Zakiah. 2016. Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 14 No. 2, 113-124
- Zeza A, Tasciotti L. 2010. *Urban agriculture, poverty, and food security: empirical evidence from a sample of developing countries. Food Policy.* 35(4):265-273.